

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk sumber daya tambang seperti batu bara, nikel, emas, dan minyak bumi yang berperan besar dalam perekonomian nasional. Namun, aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta degradasi lahan. Dampak sosial seperti konflik lahan, penggusuran masyarakat lokal, dan ketimpangan ekonomi juga sering muncul akibat praktik tambang yang tidak beretika. Oleh karena itu, perusahaan tambang di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, seperti reklamasi lahan pasca-tambang, pengelolaan limbah yang baik, serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Sehingga, organisasi bisnis harus memberikan perhatian pada aspek sosial dan juga lingkungan hidup yang merupakan bentuk usaha atau upaya dari perusahaan terkait dalam menjaga keberlangsungan kehidupan perusahaan tersebut (Setiawan et al., 2022).

Organisasi bisnis secara garis besar memiliki dua lingkungan, yaitu secara umum dan khusus. Lingkungan umum (*general environment*) menjadikan ekonomi, budaya, pendidikan, hukum, dan juga politik sebagai bahan pertimbangan yang dapat mempengaruhi organisasi. Sedangkan lingkungan khusus (*special*

*environment*) merupakan kondisi lingkungan yang berhubungan dengan individu maupun organisasi yang memiliki interaksi di dalamnya dengan organisasi yang memiliki tujuan untuk menjaga keberlangsungan roda bisnis perusahaan (Setiawan et al., 2022). Oleh karena itu, perusahaan yang ingin tetap diterima dalam jangka panjang hendaknya tidak hanya mementingkan profit atau keuntungan perusahaan saja melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi (Madani & Gayatri, 2021).

Menurut GRI G4 *Guidelines* (2021), terdapat tiga dimensi utama dalam *sustainability report*, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dimensi lingkungan mencakup dampak organisasi terhadap organisme hidup dan elemen tak hidup, termasuk air, tanah, udara, ekosistem, serta sumber daya alam lainnya. Dimensi sosial berkaitan dengan dampak organisasi terhadap sistem sosial di wilayah operasionalnya, meliputi praktik ketenagakerjaan yang nyaman seperti penyediaan lapangan kerja, pelatihan, serta keselamatan dan kesehatan pekerja. Selain itu, aspek sosial juga mencakup perhatian terhadap hak asasi manusia melalui prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, tanggung jawab terhadap masyarakat seperti kepedulian terhadap isu kebijakan publik dan perilaku anti-kompetitif, serta tanggung jawab publik yang mencakup kesehatan dan keselamatan pelanggan, komunikasi pemasaran, dan perlindungan privasi konsumen. Sementara itu, dimensi ekonomi menyoroti dampak organisasi terhadap sistem ekonomi di tingkat regional, nasional, dan global.

Peristiwa terkait aspek lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas operasi bisnis dibuktikan dari beberapa kasus yang telah terjadi Indonesia. Salah satunya yaitu peristiwa kebocoran gas klorin di pabrik PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills di Karawang, Jawa Barat, telah terjadi berulang kali dan menimbulkan dampak serius pada kesehatan masyarakat sekitar. Warga mengalami gangguan pernapasan, pusing, dan mual akibat paparan gas klorin yang merupakan limbah berbahaya. Selain merusak kualitas lingkungan, peristiwa ini juga menunjukkan lemahnya sistem pengendalian risiko perusahaan dalam pengelolaan limbah. Wahyudin, direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jawa Barat, mengatakan bahwa apabila terjadi adanya pelanggaran oleh perusahaan, entah terkait perizinan, pencemaran lingkungan, maupun teknologi yang digunakan, pemerintah harus menjatuhkan sanksi pada pihak tersebut (BBC News Indonesia, 2024).

Peristiwa tambang ilegal di Kalimantan Selatan baru-baru ini juga menelan korban jiwa akibat aktivitas operasional pertambangan yang tidak aman, mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan regulasi dan keselamatan pekerja. Kejaksaan Agung mencatat bahwa kerugian perekonomian negara akibat penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah mencapai Rp271 triliun, yang sebagian besar disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Bekas area tambang yang seharusnya dipulihkan justru dibiarkan terbuka, menyebabkan kerusakan tidak hanya di kawasan hutan dan non-hutan,

tetapi juga di wilayah pesisir dan laut. Walhi mencatat terjadinya deforestasi besar-besaran akibat kegagalan perusahaan, baik yang berizin maupun tidak, dalam melakukan reklamasi, sehingga terdapat lebih dari 12.000 lubang galian yang terbengkalai. Kondisi tersebut memicu 21 kasus tenggelam, di mana 15 korban meninggal dunia dan 12 di antaranya adalah anak-anak hingga remaja berusia 7 hingga 20 tahun (BBC News Indonesia, 2023).

Kedua peristiwa tersebut merupakan bentuk nyata alasan dari pentingnya pengungkapan *sustainability report* sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Informasi yang transparan mengenai kegiatan perusahaan sangat diperlukan agar para *stakeholder* dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan perusahaan serta dampak apa saja yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar (Madona & Khafid, 2020). Menurut Elkinton (1998) konsep *triple bottom line* yang mencakup *People*, *Planet*, dan *Profit* untuk mengungkapkan bentuk pertanggungjawaban ekonomi, lingkungan, dan sosial. *Sustainability report* dapat menjadi media yang menyediakan pelaporan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan (Setiawan et al., 2022).

*Sustainability report* merupakan praktek pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada *stakeholder* (Madona & Khafid, 2020). Pengungkapan *sustainability report* dapat membantu perusahaan dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan, meningkatkan kepercayaan

*stakeholder*, memberikan citra baik perusahaan yang tidak hanya berdasarkan pada kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba tapi juga kepeduliannya terhadap lingkungan dan sosial, dan perusahaan memiliki daya saing lebih tinggi karena memiliki kualitas sumber daya manusia yang mumpuni serta teknologi ramah lingkungan (Tobing et al., 2019).

Pemerintah Indonesia telah mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report* yang implementasinya dilakukan secara bertahap hingga 2025. Regulasi ini tertuang melalui Peraturan OJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Pengungkapan *sustainability report* merupakan salah satu wadah yang dijadikan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan membangun citra positif perusahaan kepada *stakeholder*. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi dimana teori tersebut menjelaskan bahwa pihak pemangku kepentingan menginginkan kepastian perusahaan telah memenuhi aturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Sembiring & Hardiyanti, 2020).

PWC Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia sebanyak 88% pada tahun 2022. Pengungkapan *sustainability report* di Indonesia telah diwajibkan bagi lembaga keuangan dan perusahaan terbuka sejak tahun 2019 dan perusahaan tercatat pada tahun 2020. Namun, dikarenakan adanya fenomena covid-19, penerapannya

diundur ke tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 4 Tahun 2022. Tahun kedua inilah sebanyak 88% perusahaan tercatat telah mengungkapkan *sustainability report* tahun 2022. Perusahaan berskala besar cenderung menjalankan lebih banyak kegiatan operasional, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak lebih luas terhadap masyarakat (Madani & Gayatri, 2021), sehingga selaras dengan teori legitimasi, dimana ukuran perusahaan tidak terlepas dari peran lingkungan serta masyarakat sehingga perusahaan harus tetap menyelaraskan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang berlaku di tempat perusahaan beroperasi.

Perusahaan besar cenderung melakukan lebih banyak kegiatan yang berpotensi memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, sehingga perusahaan besar biasanya menarik perhatian publik lebih besar dibandingkan perusahaan kecil (Madani & Gayatri, 2021). Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menentukan besar atau kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan (Gunawan & Sjarief, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Sjarief (2022) menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan maka *sustainability report* yang diungkapkan semakin banyak pula. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan menyebabkan semakin tinggi upaya yang dilakukan manajer untuk meningkatkan reputasi perusahaan dengan cara meningkatkan pengungkapan *sustainability report* perusahaan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa aktivitas

operasional yang dijalankan dalam batasan dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat perusahaan beroperasi.

Penelitian yang dilakukan Roviqoh dan Khafid (2021), menyatakan hal sebaliknya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Roviqoh dan Khafid (2021), menyatakan bahwa besarnya nilai ukuran perusahaan tidak diimbangi dengan adanya peningkatan *item* dalam pengungkapan *sustainability report*. Hal tersebut dikatakan karena adanya pemikiran bahwa perusahaan besar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya dan telah diakui publik, selain itu perusahaan besar juga hanya terlalu fokus pada *profit* dan mengesampingkan tanggung jawabnya dalam mengungkapkan *sustainability report*.

Selain ukuran perusahaan, kepemilikan institusional juga menjadi salah satu faktor pengungkapan *sustainability report*. Menurut Rahmat (2022), kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi dari seluruh saham perusahaan yang beredar (Amaliyah & Solikhah, 2019). Berdasarkan teori *stakeholder*, dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong pengungkapan *sustainability report* yang tinggi, karena dengan adanya kepemilikan institusional otomatis dapat mendorong serta mengontrol perusahaan perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report* yang baik sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan sehingga perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Novius (2023) menyatakan hal sebaliknya. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan atas kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal tersebut dapat terjadi karena pemilik institusional lebih berfokus pada peningkatan profit perusahaan, sehingga biaya-biaya untuk kegiatan sosial dan lingkungan akan ditekan, yang mana akan menekan perusahaan juga untuk melakukan pengungkapan yang lebih kecil agar tidak meningkatkan biaya.

Selain adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial juga menjadi faktor pengungkapan *sustainability report*. Kepemilikan manajerial merupakan keadaan di mana manajer perusahaan selain menjabat sebagai manajemen perusahaan juga merupakan pemegang saham yang turut aktif untuk pengambilan keputusan (Mujiani & Nurfitri, 2020). Penelitian Mujiani dan Nurfitri (2020) menyatakan bahwa kepemilikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *sustainability report*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Susadi dan Kholmi (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga ketika



manajer juga pemegang saham akan menjadikan perusahaan dikendalikan lebih oleh manajer (Amaliyah & Solikhah, 2019).

Manajemen perusahaan dapat membentuk komite audit untuk membantu dalam memastikan bahwa *sustainability report* yang dipublikasikan telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan *stakeholder*. Menurut POJK No 55/POJK.04/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisari dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Novius (2022) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal ini dapat disebabkan karena komite audit tidak terlalu berfokus pada luas pengungkapan *sustainability report* melainkan lebih berfokus dalam menyelesaikan temuan-temuan audit serta menelaah pengaduan dalam perusahaan.

Rahaditama (2022) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitiannya menyatakan selain menerbitkan laporan keuangan yang berintegritas, komite audit akan menyampaikan kepada manajemen untuk mengungkapkan informasi dalam laporan tambahan yaitu pengungkapan *sustainability report*. Melalui jumlah anggota, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Penelitian sebelumnya juga menyajikan berbagai temuan yang berbeda, serta masih belum banyak yang menggunakan Jumlah Komite Audit sebagai variabel yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Oleh karena itu, pada penelitian ini keterbaruan yang akan diangkat adalah penambahan variabel Jumlah Komite Audit yang diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit. Penelitian ini akan mengombinasikan dua aspek pengukuran terkait komite audit, yaitu frekuensi rapat komite audit dalam satu tahun dan Jumlah Komite Audit yang diukur berdasarkan jumlah anggotanya. Penggabungan dua variabel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran komite audit dalam mendorong pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Jumlah Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
5. Apakah Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*.
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap pengungkapan *sustainability report*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan Jumlah Komite Audit terhadap pengungkapan *sustainability report*.

## 2. Bagi Akademisi

Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan dalam meneliti dampak pengungkapan *sustainability report* bagi perusahaan dengan menggunakan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan Jumlah Komite Audit sebagai variabelnya.